

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori merupakan penggunaan beberapa teori yang relevan dengan penelitian yang dilaksanakan ini, baik *grand theory*, *middle theory*, maupun *applied theory*. Teori-teori tersebut sebagai *tools of analysis* terhadap fenomena yang menjadi obyek penelitian, oleh karena itu akan dideskripsikan terlebih dahulu secara satu persatu teori-teori yang digunakan ini berdasarkan pendapat para ahli dan diakhiri dengan membuat sintesa dihadapkan dengan penelitian yang dilaksanakan.

2.1.1 Ilmu Pertahanan

Ilmu pertahanan merupakan ilmu yang dirumuskan dari fenomena yang secara terus menerus diteliti dan diamati perkembangannya dan telah berada semenjak entitas yang disebut negara ini ada. Namun, sebagai ilmu, tidak seperti ilmu-ilmu lain yang telah berusia berabad-abad seperti ilmu filsafat, sejarah, ilmu alam, ilmu politik, ekonomi, dan berbagai ilmu lain, yang keberadaannya sudah diakui oleh masyarakat luas, baik itu di kalangan masyarakat umum, maupun di komunitas akademisi. Obyek dari ilmu pertahanan yang mencerminkan perilaku negara untuk menjaga dan mengembangkan keberlanjutan negara yang bersangkutan. Ilmu pertahanan juga adalah ilmu tentang seluruh aspek yang berhubungan dengan keamanan dalam skala nasional yang melekat pada tujuan penyelenggaraan pertahanan negara (Tippe, 2016). Ilmu Pertahanan merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana mengelola sumber daya dan kekuatan nasional pada saat damai, perang dan pada saat sesudah perang, guna menghadapi ancaman militer dan non-militer terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan segenap bangsa dalam rangka mewujudkan keamanan nasional (Supriyatno, 2014). Sebagai sebuah disiplin ilmu, ilmu pertahanan mengkaji mengenai keseluruhan aspek yang berhubungan dengan keamanan dalam skala nasional serta melekat pada tujuan penyelenggaraan negara. Ilmu pertahanan harus mampu mencegah ancaman yang saat ini selalu berkembang akibat dinamika

lingkungan strategis. Dengan demikian tujuan ilmu pertahanan adalah sebagai berikut:

- a. Komponen pertahanan, siap digunakan dalam rangka menjaga tetap tegak dan eksistensi suatu negara khususnya, dan umumnya untuk menjaga keamanan nasional (*national security*); dan
- b. Komponen pertahanan, siap digunakan pada saat diperlukan untuk menanggulangi berbagai macam ancaman, baik ancaman yang berbentuk ancaman militer maupun non-militer, dan baik ancaman dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang berupa *Low Intensity Conflict* (LIC). Tujuan akhir dari Ilmu Pertahanan adalah menyiapkan daerah pertempuran agar satuan yang melaksanakan operasi dapat memenangkan setiap pertempuran, melawan musuh-musuh negara.

Ilmu pertahanan dalam masa damai bermanfaat untuk mengkaji terkait dengan bagaimana melakukan manajemen atau pembinaan potensi sumber daya nasional sebagai kekuatan nasional supaya pada saat dan setelah perang dapat menguntungkan negara. Penerapan ilmu pertahanan dapat dimulai dengan membuat regulasi, kebijakan, strategi, dan implementasi dari kebijakan tersebut hingga ke tingkat operasional (Supriyatno, 2014). Pembinaan potensi pada masa damai berguna dalam rangka menjaga kedaulatan teritorial, kerangka *deterrent strategy*, *si vis pacem, para bellum*, dan membangun keamanan nasional, serta turut serta dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan dan dunia.

Dalam membangun pertahanan suatu negara menurut Cleary dan McConville (Cleary, 2006) menyampaikan.

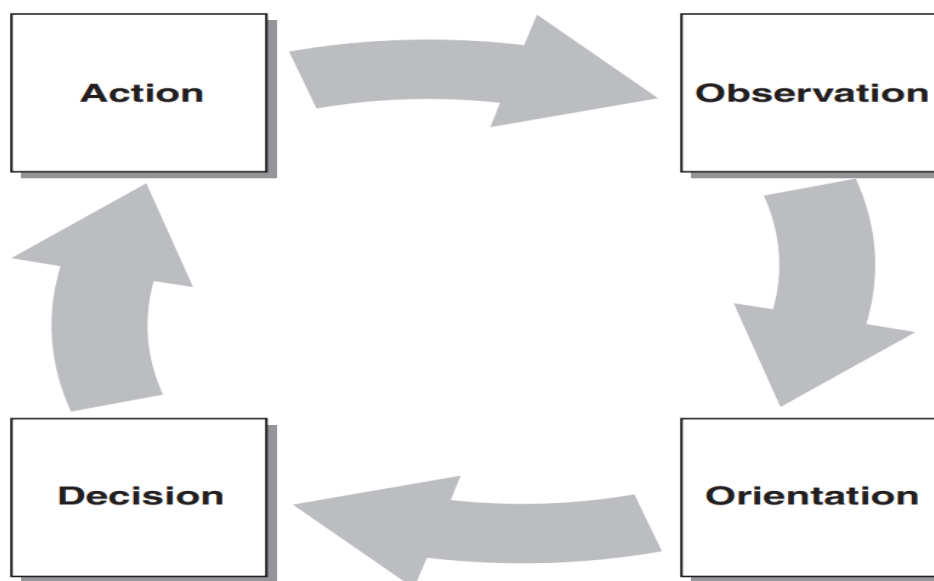
“The defence sector presents an equally enormous challenge as it brings together diverse organizations: the military, the civil service in various departments of government, defence agencies and private sector industries.”

Dari pernyataan tersebut mengandung makna bahwa membangun sektor pertahanan bukan suatu hal yang mudah, karena dibutuhkan kesamaan persepsi dan pendapat dari berbagai kalangan baik sipil dalam hal ini seluruh

warga negara maupun militer. Dengan pertimbangan yang sudah didiskripsikan sebelumnya mengenai seberapa besar dampak terhadap kekuatan pertahanan dapat dilakukan dengan analisis berdasarkan kepada ancaman yaitu melakukan analisis terhadap perkiraan ancaman, dan analisis berdasarkan kapabilitas yaitu menganalisis kemampuan sendiri untuk bisa melakukan tindakan militer, sebagai bentuk usaha-usaha pertahanan. Menjadikan ilmu pertahanan sebagai literatur yang sangat relevan terhadap penelitian ini, yang pada dasarnya adalah merumuskan suatu strategi dengan dasar-dasar Ilmu Pertahanan.

2.1.2 Teori Strategi

Mengutip pernyataan Henry Kissinger dalam Andrianopoulos, G. A. “*Strategy is the mode of survival of a society*” yang berarti bahwa strategi merupakan pilihan aksi suatu komunitas untuk bertahan hidup (Andrianopoulos, 1991). Berikutnya adalah referensi dari buku *Science, Strategy and War* oleh John Boyd, menawarkan konsep strategi seperti gambar dibawah.



Gambar 2.1 Konsep John Boyd

Sumber: The Strategic Theory of John Boyd (2005, p. 2)

Gambar di atas merupakan konsep untuk Menyusun strategi menurut John Boyd yang didapat melalui siklus *Obsevation*, *Orientation*, *Decision* dan *Action* (OODA) atau OODA *loop* setara dengan siklus keputusan. Implementasi

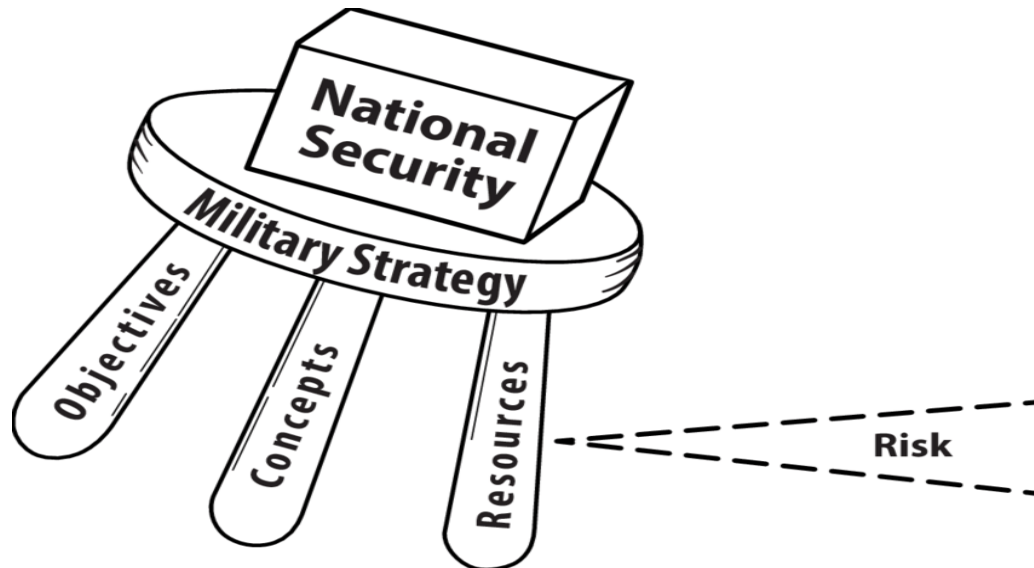
OODA *loop* sering digunakan dalam penentuan keputusan perang, keberhasilan dalam perang tergantung pada kemampuan berpikir untuk mengalahkan jalan keluar lawan, atau dengan penempatan yang berbeda, pada kemampuan untuk melewati siklus OODA lebih cepat daripada lawan (Osinga, 2005).

Arthur F. Lykke selama bertahun-tahun mengajarkan mahasiswa *Army War College* untuk menggunakan modelnya dengan benar melalui definisi dan ilustrasi. Definisi dan ilustrasi ini penting karena memberikan pemahaman umum yang digunakan para ahli strategi untuk berkomunikasi (Lykke, 2001). Adalah sebagai berikut:

- a. *Ends (objectives)* menjelaskan "apa" yang harus dicapai. Maksudnya adalah tujuan yang, jika dicapai, dibuat, atau disumbangkan, untuk pencapaian akhir negara. Tujuan diekspresikan dengan kata kerja (yaitu, mencegah perang, mempromosikan stabilitas regional, menghancurkan angkatan bersenjata);
- b. *Ways (strategic concepts/courses of action)* menjelaskan "bagaimana" tujuan harus dicapai dengan menggunakan sumber daya. Konsep ini harus cukup eksplisit untuk memberikan panduan perencanaan kepada mereka yang akan menggunakan sumber dayanya; dan
- c. *Means (resources)* menjelaskan sumber daya spesifik apa yang akan digunakan dalam menerapkan konsep untuk mencapai tujuan. Yang dimaksud sumber daya dalam hal ini Mereka bisa berwujud dan tidak berwujud. Kekuasaan, orang, peralatan, uang, dan fasilitas adalah contoh sarana berwujud. Keinginan, keberanian, dan kecerdasan adalah contoh dari sumber daya tidak berwujud.

Risiko menjelaskan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai dan konsep serta sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan. Karena tidak pernah ada sumber daya yang cukup atau konsep yang cukup bagus untuk memastikan 100 persen kesuksesan dalam lingkungan internasional yang

kompetitif, selalu ada beberapa risiko. Ahli strategi berusaha meminimalkan risiko ini melalui pengembangan strateginya dengan menjaga keseimbangan tujuan, cara, dan sarana.



Gambar 2.2 model Strategi Lykke

Sumber: Lykke, (2001).

Mendefinisikan strategi sebagai teori kesuksesan, memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana strategi berbeda dari perencanaan berbasis sarana dan memfasilitasi proses unggul. Tanpa teori keberhasilan yang dinyatakan dengan jelas, asumsi tetap tersembunyi dan logika kabur. Strategi harus menggambarkan bagaimana dan mengapa tindakan yang diusulkan akan menyebabkan pencapaian suatu tujuan (Meiser, 2017).

Secara singkatnya teori strategi adalah suatu analisa mengenai hubungan antara tujuan dan sarana, dengan kemampuan terhadap ancaman baik nyata atau ancaman potensial untuk mempertahankan eksistensi suatu kelompok. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan model teori tersebut di atas untuk menyusun strategi pertahanan perairan pedalaman pada pembahasan atas data-data penelitian yang didapatkan.

2.1.3 Teori Sea Power

Sea Power adalah hal-hal dasar yang dibutuhkan untuk menuju kebesaran bangsa. *Sea Power* secara umum dijelaskan termasuk di dalamnya semua aspek kekuatan laut. merumuskan Kekuatan laut atau *Sea Power*

mengandung pengertian kemampuan suatu negara untuk menggunakan dan menguasai laut (*Sea Control*) dan mencegah lawan untuk melakukannya *Sea Denial*. Selain itu *Sea Power* juga dapat diartikan sebagai negara yang memiliki kekuatan Angkatan Laut (AL) yang kuat (Marsetio, 2017). Sementara itu terminologi *sea control* mengandung arti bahwa tidak mungkin kecuali dalam arti yang paling terbatas untuk menguasai laut secara total untuk digunakan oleh suatu kekuatan atau untuk disangkal sepenuhnya oleh lawan. *Sea control* pada dasarnya berarti kemampuan armada laut untuk beroperasi dengan tingkat kebebasan yang tinggi di suatu wilayah laut atau samudera dengan jangka waktu terbatas (Sutanto, 2022).

Pendapat lain yang senada dengan *sea control* yaitu Corbett tentang “*Command of the Sea*” sebagai konsep yang memberikan kontribusi bagi teori ke Angkatan Lautan. Dari dua pemikiran ahli strategi laut tersebut menjelaskan pentingnya pengamanan jalur pelayaran laut untuk kepentingan pertahanan sekaligus ekonomi. Corbett mengakui bahwa laut adalah arena ekonomi, dan AL ada untuk melindungi atau memajukan kepentingan nasional. Konsep *sea control* modern dapat didefinisikan sebagai kondisi suatu negara yang memiliki kebebasan bertindak dalam penggunaan wilayah laut untuk tujuan tertentu setiap saat dan jika perlu untuk mencegah penggunaannya untuk tujuan lawan (British Maritime Doctrine, 2017). *Sea control* adalah proses yang sangat dinamis yang dapat mengalami perubahan drastis selama perang. Dari waktu ke waktu salah satu pihak yang berperang dapat memiliki kendali laut atas wilayah tertentu dalam kurun waktu lama, sementara di lain waktu tidak ada pihak yang memiliki kendali.

Dalam pandangan Sir Julian S. Corbett (1854–1922) situasi paling umum dalam perang di laut adalah tidak ada pihak yang memiliki komando. “*The normal state was not of a commanded sea, but of an uncommanded sea*” (Corbett, 2018). Memiliki kendali di satu area tidak menjamin memperoleh keamanan secara lengkap atas semua operasi yang dilakukan oleh suatu kekuatan armada tetapi hanya sebagai an besar dari operasi tersebut. Musuh dapat memperdebatkan kontrol dengan melakukan tindakan sporadis dalam durasi yang terbatas.

Sehingga dapat disintesis bahwa *sea power* merupakan modal dasar untuk suatu negara kepulauan seperti Indonesia agar dapat mengembangkan potensi kemaritimannya, melalui TNI AL dengan penerapan *sea control* atau *sea denial* dan dengan menggugulkan semua sumber daya kemaritiman sebagai modal utama pelaksanaannya, hal ini menyebabkan teori *Sea Power* relevan dengan penelitian ini.

2.1.4 Teori Ancaman

Dalam BPPI 2015 (Kemhan, 2015), persepsi Indonesia tentang ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari luar maupun dari dalam negeri, yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa. Ancaman merupakan faktor utama yang menjadi dasar penangkalan, bersifat nyata, dan potensial. Berdasarkan sifat ancaman, hakikat ancaman digolongkan ke dalam ancaman militer dan ancaman non-militer.

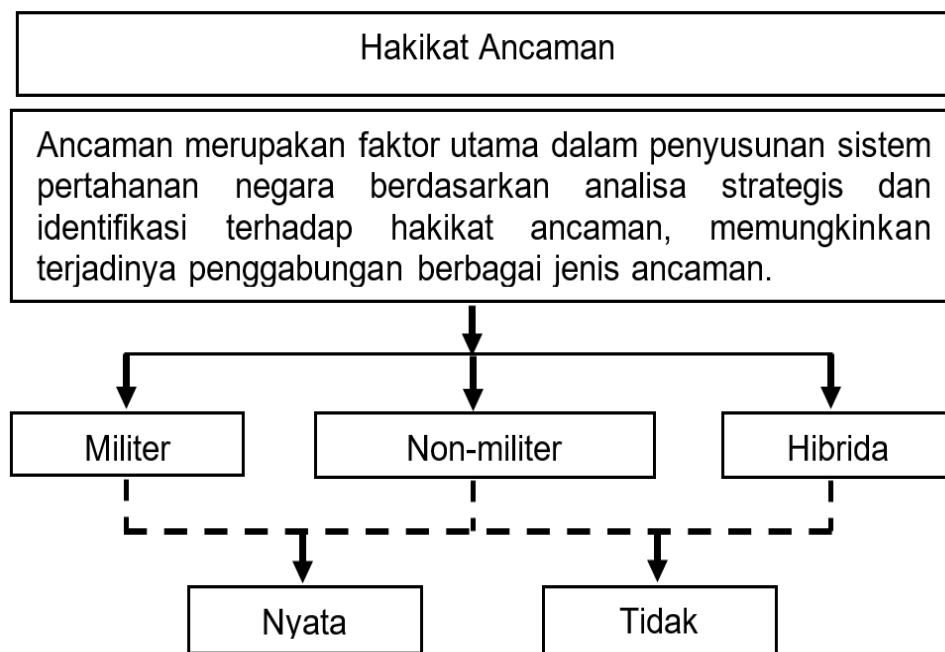
Ancaman militer merupakan ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal.

Ancaman non-militer pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman non-militer dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi, serta keselamatan umum. Namun, ada perubahan mengenai penggolongan ancaman pada BPPI tahun 2015.

Hal ini karena dipengaruhi dinamika perubahan lingkungan dan konteks strategis terus-menerus membawa perubahan dalam spektrum ancaman kompleks, yang berimplikasi pada pertahanan nasional. Kompleksitas ancaman dibagi menjadi pola multidimensi dan jenis ancaman seperti ancaman militer,

ancaman non-militer, dan ancaman hibrida, yang dapat diklasifikasikan sebagai ancaman nyata atau tidak nyata.

Dalam menghadapi ancaman non-militer, menempatkan Kementerian/Lembaga (K/L) di luar bidang pertahanan sebagai Unsur Utama dibantu Unsur Lain Kekuatan Bangsa. Belakangan, akibat serangan Hibrida tersebut, Indonesia meningkatkan level intelijen militer yang dilengkapi dengan intelijen non-militer yang dibentuk dalam Komponen Pendukung sesuai dengan perkembangan ancaman dan eskalasi.



Gambar 2.2 Hakikat Ancaman

Sumber: Buku Putih Pertahanan Indonesia (2015, p. 22)

Dalam buku *Counterintelligence theory and practice* oleh Henry Prunckun mengatakan bahwa Ancaman merupakan tujuan seseorang untuk membahayakan orang lain. Selanjutnya ancaman itu sendiri bisa dilakukan oleh perorangan, kelompok atau bahkan negara. Kemudian dijelaskan ada dua komponen pokok yang dipakai untuk menganalisa ancaman, yaitu *threat intent* dan *threat capability* (Prunckun, 2019). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ancaman di defenisikan sebagai “usaha yang dilaksanakan secara konsepsional melalui tindak politik dan atau kejahatan yang diperkirakan dapat membahayakan tatanan serta kepentingan negara dan bangsa”.

Kemudian dalam buku *New Threats and New Actors in International Security*, dijelaskan mengenai Analisa ancaman yang umumnya ditentukan oleh probabilitas, ruang lingkup, intensitas, dan obyeknya (Krahmann, 2005). Selanjutnya dijelaskan bahwa jenis ancaman baru memiliki jenis yang beragam dalam lingkup dan intensitasnya yang menyebabkan kesulitan untuk menilainya, akibatnya jelas seperti migrasi sebagai an besar populasi, kerusakan ekonomi, pemendekan harapan hidup dan pemotongan investasi asing. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka ancaman merupakan usaha yang dilakukan dengan menggunakan kemampuan suatu entitas dengan tujuan untuk membahayakan, merusak dan jahat terhadap entitas lainnya.

Berdasarkan penjelasan teori tersebut di atas maka ancaman merupakan sesuatu hal yang melandasi konsep penyusunan suatu strategi yang berkaitan dengan tema penelitian ini dimana IKN sebagai Obvitnas pasti tidak akan lepas dari ancaman-ancaman yang harus ditangani dengan baik. Untuk dapat menghadapi berbagai situasi dan kondisi di masa perang atau pada masa damai.

2.1.5 Teori Pertahanan Maritim.

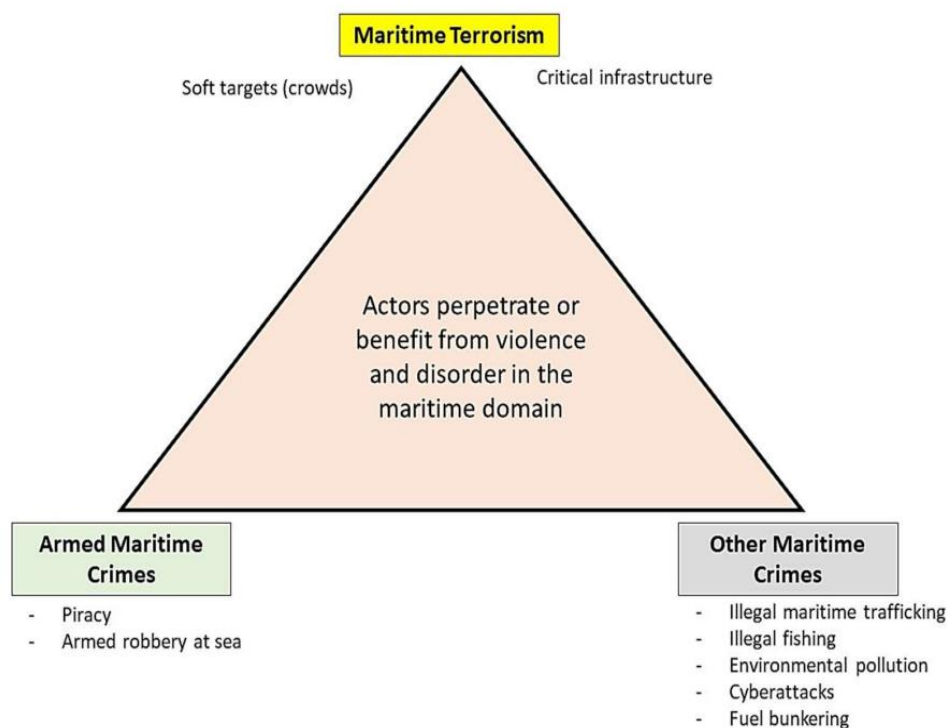
Pertahanan Maritim pada prinsipnya pertahanan suatu negara dibangun untuk menghadapi ancaman. Ancaman pada hakikatnya dapat ditinjau dari berbagai macam perspektif, hal ini tergantung kepada bagaimana cara pandang suatu entitas. Menurut Bandoro dalam Putra (Putra I. N., 2016), menyebut ancaman, Segala jenis hal baik datang dari dalam maupun luar negeri dan bersifat masih berupa potensi maupun bentuk aktivitas yang mengancam kedaulatan, keutuhan, dan termasuk upaya mengubah hakikat suatu negara berdaulat. Ancaman dapat dikonstruksikan ke dalam rangkaian pengakuan yang menyatakan suatu pernyataan generik terkait dengan perlindungan terhadap suatu rujukan objek tertentu.

Dalam konteks maritim, maka ancaman sebagaimana yang diuraikan di atas menjadi hal penting dalam kajian keamanan maritim yang pada akhirnya diperlukan suatu upaya membangun pertahanan maritim. Menurut (Putra I. N., 2016). Terdapat tiga kerangka penting untuk merumuskan konsep keamanan maritim itu sendiri yaitu matriks keamanan maritim (*maritime security matrix*),

kerangka sekuritisasi maritim (*securitization framework*), dan kelompok pengguna praktik keamanan (*Security and Communities of Practise*).

Melalui ketiga hal tersebut, maka akan dapat dipetakan bagaimana merumuskan keamanan maritim yang relevan dari perspektif membangun pertahanan maritim. Karena pada prinsipnya keamanan maritim memiliki korelasi yang kuat dengan dimensi-dimensi lain dalam konteks pertahanan maritim yaitu keamanan nasional, keamanan ekonomi, keamanan manusia (masyarakat), dan lingkungan maritim sendiri. Maka, perhatian utama dari strategi maritim adalah menentukan hubungan timbal balik antara tentara dan AL dalam rencana perang (Bartholomees, 2012). Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi yang dijalankan oleh AL tidak bisa dilepaskan dari kontribusi kekuatan di darat. Penjelasan ini mendukung bahwa pembinaan maritim merupakan bagian penting mendukung strategi operasi laut yang dijalankan oleh TNI AL.

Sedangkan (Shemella, 2016) menggambarkan adanya 3 (tiga) bentuk ancaman kejahatan dalam domain maritim yang berhubungan dengan pertahanan maritim sebagai berikut:



Gambar 2.3: The Maritime Violence Ecosystem

Sumber: Shemella (2016:2)

Dari gambar di atas, menunjukkan adanya pemetaan yang dibuat oleh Shemella bahwa ancaman kejahatan yang menggunakan kawasan laut dan sekitarnya merupakan hal yang perlu ditangani dengan serius. Terlebih ada keterkaitan antara aspek pertahanan dengan aspek perekonomian negara yang dapat terganggu stabilitasnya.

Selanjutnya A.T. Mahan dalam bukunya yang sangat fenomenal *The Influence Of Sea Power Upon History*, disampaikan bahwa, ada enam syarat sebuah negara maritim yaitu letak geografis, karakter tanah dan pantai, luas wilayah, jumlah penduduk, karakter penduduk, dan karakter pemerintahan (Mahan, 1890). Sehingga pertahanan maritim menjadi suatu bahan kajian yang sangat relevan terhadap Indonesia sebagaimana dikatakan oleh A.T. Mahan, apabila diterapkan oleh Indonesia apabila konsentrasi negara beralih menggunakan kekuatan maritim sebagai media pertahanan negara.

Korelasi pertahanan maritim pada penelitian ini adalah dalam domain ancaman non-militer, adalah dilihat dari aspek jenis ancaman secara umum berasal dari kemaritiman, yang memiliki ekosistem sendiri dimana penanganannya tidak dapat dibebankan kepada satu instansi sendiri tetapi melalui interoperabiliti stakeholder yang memiliki kewenangan dibidang kemaritiman.

2.1.6 Teori Kebijakan Pertahanan

Untuk dapat mengerti teori ini maka perlu diketahui terlebih dahulu mengenai pengertian-pengertian terhadap terminologi kalimat kebijakan pertahanan, pertama pengertian kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat (Suhardono, 2022). Jadi kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam bertindak, secara umum kebijakan bersifat proaktif dan merupakan jawaban suatu permasalahan.

Kedua, secara hakikat pertahanan adalah segala upaya pertahanan yang bersifat semesta, yang penyelenggaraannya atas dasar kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta atas keyakinan terhadap kekuatan

sendiri (Suhardono, 2022). Definisi mengenai kebijakan banyak disampaikan oleh para ahli, diantaranya definisi yang disampaikan oleh Sodagar (Sodagar, 2018), bahwa kebijakan itu adalah "*Purposive course of action or inaction undertaken by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*". Menurutnya, kebijakan menjadi perhatian dari pemerintah pada saat ada permasalahan yang berkembang di masyarakat dan sudah mengarah pada terjadinya keresahan di kalangan mereka.

Kebijakan merupakan suatu solusi untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Ketidacermatan perumusan suatu kebijakan tidak jarang berdampak pada tidak efektifnya penerapan kebijakan itu sendiri. Efektivitas kebijakan publik akan terukur dari seberapa besar kebijakan tersebut dapat direalisasikan dan memberi solusi terhadap berbagai masalah publik yang sedang terjadi. Dalam teori Pareto (Nugroho, 2020), "Kebijakan publik adalah faktor 20% yang menyebabkan terjadinya yang 80%". Sedangkan dalam UU RI No. 34 Tentang TNI, dijelaskan bahwa Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Pendapat lain mengenai kebijakan pertahanan menurut Hays builder Vallance dan Tassel (Scowcroft, 1997) mendefinisikan kebijakan pertahanan dicapai melalui empat cara yaitu: Pertama, kebijakan pertahanan adalah sebuah perencanaan atau kegiatan yang berkaitan dengan rekrutmen, Latihan, pengorganisasian, pemberian perlengkapan, pengerahan dan penggunaan kekuatan bersenjata. Kedua, kebijakan pertahanan merujuk kepada bagaimana menjaga negara, keselamatan rakyatnya, dan kepentingan nasional melalui ancaman dan penggunaan kekuatan militer secara nyata. Ketiga, kebijakan pertahanan merupakan suatu proses politik. Keempat, kebijakan pertahanan merupakan suatu bidang kajian dari berbagai disiplin ilmu.

Dalam domain pertahanan ada pepatah kuno "*Si vis pacem, para bellum.*" Yang artinya, siapa yang ingin damai maka harus siap untuk perang.

Dengan dasar tersebut maka kebijakan pertahanan digunakan sebagai pedoman untuk mengembangkan penggunaan dan pelibatan kekuatan militer. Oleh karena itu, kebijakan pertahanan dapat dikatakan sebagai suatu tindakan politik yang berdasarkan perencanaan dan perumusan yang matang serta relevan agar negara mampu mengantisipasi setiap bentuk ancaman yang akan mengganggu stabilitas nasional dalam hal pertahanan kedaulatan negara.

Dalam penyusunan strategi pasti akan mempertimbangkan berbagai aspek, salah satunya adalah kebijakan pertahanan dimana hal ini menjadikan hubungan yang relevan untuk dijadikan pondasi utama dalam penelitian ini. Yang mengacu pada kemampuan sumber daya nasional dan dinamika perkembangan lingkungan strategis yang ada nantinya.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Salah satu hal yang peneliti lakukan saat melakukan penelitian ini adalah mencari kajian dan literatur terdahulu yang relevan dengan judul yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan beberapa kesimpulan yang diambil dari penelitian sebelumnya yang membahas isu-isu yang relevan dengan penelitian ini.

Sa'dianoor, Syamsul Maarif, Sobar Sutisna, Edy Saptono, Bangun Mulyo Sukojo (2022) dengan judul artikel. *Geospasial Intelligence for land defence the National's Capital*. Yang menganalisa mengenai keuntungan geospasial IKN baru di Kalimantan sebagai medan pertahanan darat untuk IKN.

Yulyanti R. e. I. (2022) dengan judul artikel Strategi Pertahanan Perairan Pedalaman Dalam Menghadapi Ancaman Non-Militer di Sungai Mahakam. Yang menganalisa mengenai strategi pertahanan perairan pedalaman di sungai Mahakam Kalimantan timur, dengan menggunakan konsep *Riverine Operation* untuk menghindari ancaman di Sungai Mahakam.

Yogo Prasetyo, Angga Faris Saputra dan S. Supartono (2021) dengan judul artikel. Operasi penyelenggaraan peperangan kepulauan sebagai strategi pertahanan laut Indonesia. Yang membahas upaya-upaya pemaksimalan strategi pertahanan laut nusantara sebagai media pertahanan nasional.

David Maharya Ardyantara, Kadi Sukarna, Bambang Sadono, Zaenal Arifin (2020) dengan judul artikel. Reposisi Kewenangan Antar Lembaga Negara Dalam Pengaturan Terkait Pertahanan Keamanan Kemaritiman Nasional. Yang menganalisa mengenai perlunya reposisi Lembaga negara yang berkepentingan di laut berada dibawah koordinator Bakamla.

Poltak Partogi Nainggolan (2015) dengan judul artikel. Indonesia dan ancaman keamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia. Yang membahas macam ancaman non-militer yang mengancam keamanan pada ALKI dan perkembangan lingkungan strategis regional.

Syarif Thoyib (2009) dengan judul artikel. Potensi Ancaman di Alur Laut Kepulauan Indonesia Dalam Perspektif Ketahanan Nasional. Yang menghasilkan suatu analisis ancaman yang terjadi pada ALKI II, yang dikaitkan dengan berbagai potensi ancaman yang relevan.

Dengan demikian peneliti dapat menampilkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Dari kelima penelitian di atas terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian. *Novelty* belum ada penelitian yang komprehensif, meneliti tentang aspek sosial dan ekonomi dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan dan perspektif Strategi Pertahanan. Untuk lebih memudahkan dalam memahami esensi keempat penelitian tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul dan Tahun	Metodelogi	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Sa'dianoor (2022). Geospasial Intelligence for land defence the National's Capital.	Pendekatan Kuantitatif diskriptif.	Pembahasan terhadap pertahanan untuk IKN.	Fokus pertahanan untuk IKN.	Pemanfaatan kondisi geografi Kalimantan sebagai medan pertahanan darat untuk IKN.
2.	Yogo Prasetyo (2021). Operasi penyelenggaraan peperangan kepulauan sebagai strategi pertahanan laut Indonesia.	Pendekatan Kuantitatif diskriptif.	Pembahasan strategi pertahanan laut, berdasarkan karakteristik geografi	Lokus penelitian yang umum dan nasional.	Pemaksimalan Strategi Pertahanan Laut Nusantara sebagai media pertahanan negara.
3.	David Maharya Ardyantara (2020). Reposisi Kewenangan Antar Lembaga Negara Dalam Pengaturan Terkait Pertahanan Keamanan Kemaritiman Nasional.	Pendekatan Kuantitatif diskriptif.	Subjek penelitian pada TNI AL dan Bakamla.	Fokus penelitiannya kewenangan K/L	Pembahasan mengenai posisi Lembaga negara yang berkepentingan di laut di koordinir oleh Bakamla.
4.	Poltak Partogi Nainggolan (2015). Indonesia dan ancaman keamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia.	Pendekatan Kuantitatif diskriptif.	Pembahasan jenis ancaman Non-Militer.	Lokus yang umum secara nasional.	Pembahasan ancaman non-militer dan perkembangan lingkungan strategis.
5.	Syarif Thoyib (2009). Potensi Ancaman Di Alur Laut Kepulauan Indonesia Dalam Perspektif Ketahanan Nasional.	Pendekatan Kuantitatif.	Meneliti potensi ancaman dari ALKI II.	Fokus penelitian pada ancaman dari ALKI II terhadap pertahanan Nasional.	Analisis ancaman yang terjadi pada ALKI II, terkait potensi ancaman.
6.	Yulyanti R. e. I. (2022) Strategi Pertahanan Perairan Pedalaman Dalam Menghadapi Ancaman Non-Militer di Sungai Mahakam.	Pendekatan Kuantitatif diskriptif	Meneliti ancaman non-militer di perairan pedalaman	Lokus penelitian di Sungai Mahakam	Pertahanan negara di Ibu Kota Nusantara dibutuhkan strategi pertahanan perairan pedalaman

Sumber: Diolah oleh peneliti, (2022)

2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini untuk memberikan penjelasan sementara mengenai fenomena yang menjadi permasalahan yang diteliti, maka peneliti menggunakan Kerangka. Kerangka pemikiran disusun berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian terdahulu. Kerangka pemikiran dalam penelitian kuantitatif disusun dengan menjelaskan keterkaitan antar variabel yang diteliti didukung dengan teori-teori atau merupakan argumentasi logis peneliti. Kerangka pemikiran ini merupakan acuan dan argumentasi peneliti dalam merumuskan hipotesis penelitian.

Berdasarkan studi literatur yang telah dilaksanakan, peneliti menemukan beberapa fenomena yang berupa persoalan-persoalan dimana banyak potensi ancaman non-militer yang datang di ALKI II, adapun potensi-potensi tersebut terlihat dari indikator yang salah salah adalah dari delapan jenis kejahatan dimana lima jenis kejahatan yang memiliki dimensi kemaritiman sangat kuat yaitu, terorisme, pembajakan di laut, penyelundupan senjata, perdagangan manusia, dan perdagangan obat-obat terlarang (Octavian, 2015, p. 28). Indikasi kejahatan yang disampaikan oleh Oktavian merupakan bentuk ancaman yang juga marak terjadi.

Akibat letaknya yang relatif dekat dengan ALKI II, yang seperti kita ketahui bahwa ALKI II merupakan salah satu jalur pelayaran internasional yang padat oleh karena lalu lintas kapal-kapal asing yang berlayar melintasinya. Selain itu ALKI II juga merupakan gerbang untuk akses kedalam wilayah kedaulatan Indonesia. Yang ternyata IKN selain berdekatan dengan ALKI juga memiliki wilayah perairan pedalaman sebagai lapisan terakhir wilayah pertahanannya, sehingga muncul kebutuhan untuk suatu sistem strategi pertahanan Laut IKN utamanya pada perairan pedalaman dikawasan IKN.

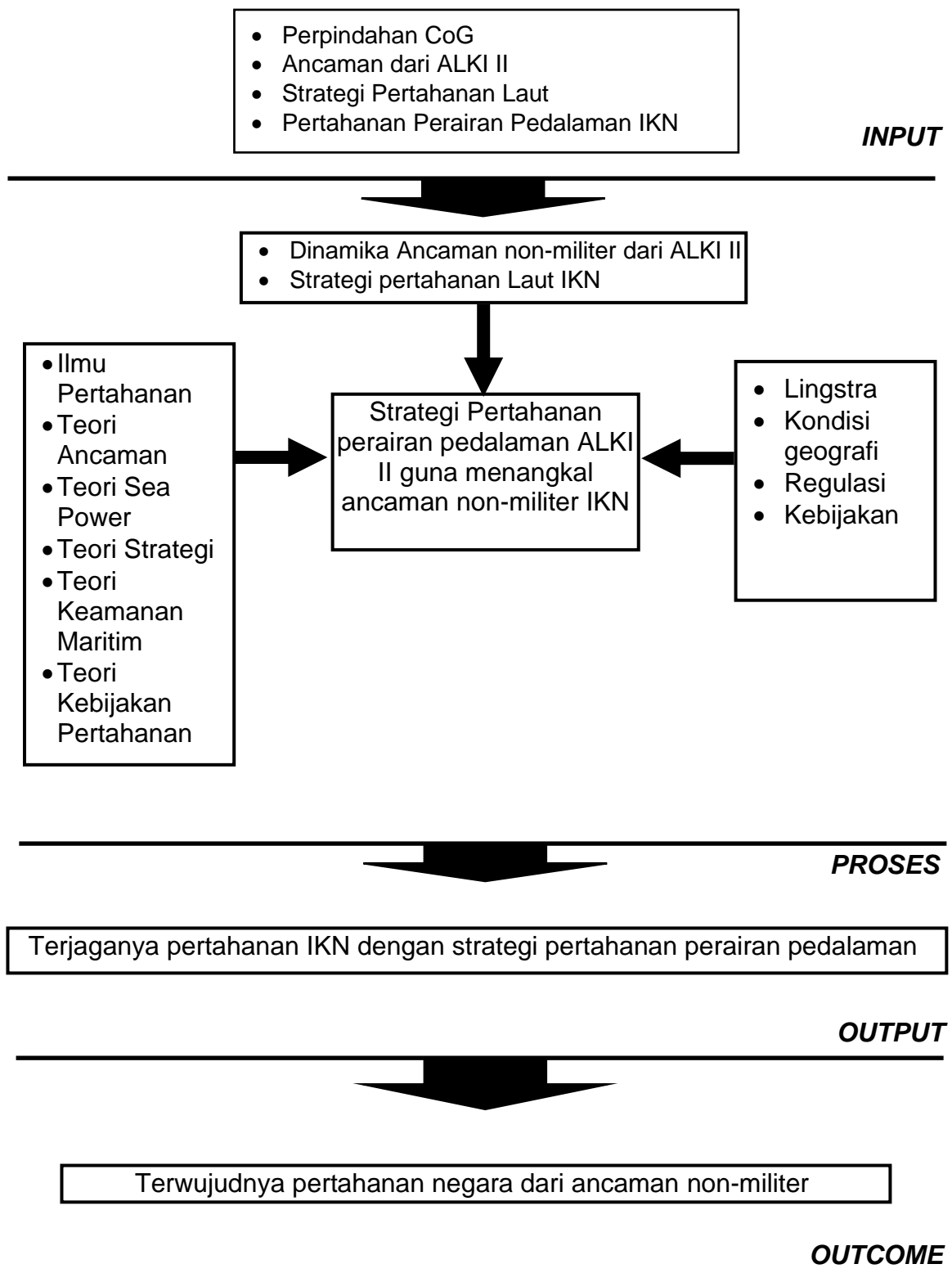
Pengaruh lingkungan strategis, pada tataran lingkungan strategis eksternal terdapat perubahan jenis dan bentuk konflik yang dapat mempengaruhi kondisi domestik sebuah negara. Sementara pada tataran lingkungan strategis internal, kurang optimalnya pengelolaan aspek politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, pertahanan, dan keamanan dapat menimbulkan ketidaknyamanan (Wantannas, 2020). Dalam hal lingkungan

strategis internal, kurang optimalnya pengelolaan khususnya aspek pertahanan, strategi pertahanan perairan pedalaman adalah bagian integral yang menjadi sangat relevan dan bisa menjadi prioritas sasaran strategis dalam rencana pembangunan pertahanan IKN Nusantara nantinya.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang tersebut di atas peneliti membuat suatu rumusan masalah yaitu bagaimana melindungi Ibu Kota negara yang memiliki fungsi sebagai CoG dari ancaman-ancaman non-militer yang datang di ALKI II. Yang kemudian didapatkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian terdiri dari: Bagaimana penanganan TNI AL terhadap ancaman non-militer di ALKI II? Dan Bagaimana strategi pertahanan perairan pedalaman menghadapi ancaman non-militer untuk mengamankan IKN?

Yang kemudian diproses dalam penelitian dengan menggunakan alat penelitian (*Instrumental input*) yang berupa metode penelitian kualitatif diskriptif, dan dengan menggunakan teori-teori yang relevan dengan tema penelitian yaitu: Ilmu Pertahanan; Teori Strategi; Teori *Sea Power*; Teori Ancaman; Teori Pertahanan Maritim; dan Teori Kebijakan Pertahanan, untuk dijadikan landasan dalam pemikiran ide pokok penelitian yang nantinya digunakan dalam membahas hasil analisis data penelitian yang didapat. Berikutnya dengan masukan dari pengaruh lingkungan (*environmental input*) yang didapatkan dari perkembangan lingkungan strategis internal dan eksternal, sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi variabel-variabel penelitian.

Dengan panduan utama proses penelitian yang menggunakan teori strategi untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ada, untuk menghasilkan keluaran/*Output* penelitian yang membuat terjaganya pertahanan IKN dengan strategi pertahanan perairan pedalaman. Dengan harapan mendapatkan capaian/*Outcome* berupa terwujudnya pertahanan negara dari ancaman non-Militer. Peneliti membuat gambar kerangka pemikiran dalam bentuk bagan untuk memperjelas uraian diskriptif sebelumnya. Gambar ini peneliti buat sesuai contoh kerangka pemikiran yang ada pada panduan pembuatan tesis kualitatif yang diterbitkan oleh Unhan seperti yang terlihat pada Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran kualitatif berikut ini:



Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah oleh peneliti. (2022).